

# **ANALISIS HIERARKI PROSES TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DALAM RENCANA PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR (Sub DAS Batang Trembesi dan Batanghari)**

Ade Maghviroh<sup>[1]</sup> Ir. Dibyo Susilo, S.T.,M.T<sup>[2]</sup>

Program Studi Teknik Sipil Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Teknologi Yogyakarta;  
e-mail:[1]ade.maghviroh13@gmail.com, [2]dibyosusilo@gmail.com

## **ABSTRAK**

Menurut WHO (2010), kebutuhan manusia dalam perharinya memerlukan 30 liter/hari, dimana 10-liter untuk minum dan 20-liter untuk sanitasi. Sedangkan menurut BPS (2014) menyatakan bahwa diperlukan air sebanyak 75,6 Milyar liter untuk 252 juta penduduk di Indonesia. Pemerintah memiliki peran dalam hal pengelolaan sumberdaya air yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berdasarkan aturan yang berlaku. Dalam mengatasi masalah tersebut, pemerintah Provinsi Jambi dapat memanfaatkan beberapa sumber daya air yang terdiri dari Sub DAS Trembesi dan DAS Batanghari untuk menentukan kriteria prioritas untuk masyarakat Jambi.

*Analitycal Hierarchy Process (AHP)* Adalah metode untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks tidak terstruktur kedalam beberapa komponen dalam susunan yang hirarki, dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif, dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut.

Dalam menentukan kriteria dalam menentukan pemanfaatan sumber daya air di Sub DAS Trembesi dan Batanghari berdasarkan kebutuhan yang ada di masyarakat. Dalam penerapan AHP dalam menentukan rencana pemanfaatan sumber daya air di Sub DAS Trembesi dan Batanghari memiliki prioritas kriteria Pemanfaatan untuk kebutuhan rumah tangga, kota, dan industry (K3). Hal ini dibuktikan dengan bobot vector kriteria 3 memperoleh nilai 0,62 atau sebesar 62%. Kemudian alternatif dalam melaksanakan kriteria ini adalah alternatif pembangunan intake air baku (A5). Hal ini ditunjukkan dengan nilai bobot 0.50. Artinya nilai kepentingan untuk dilakukan adalah 50%.

Kata kunci: AHP (Analisis Hierarki Proses), Sumber Daya Air, Kebijakan Pemerintah

# **ANALYSIS OF PROCESS HIERARCHY OF JAMBI PROVINCE GOVERNMENT POLICIES IN WATER RESOURCES UTILIZATION PLAN (Batang Trembesi and Batanghari Sub- watersheds)**

Ade Maghviroh<sup>[1]</sup> Ir. Dibyo Susilo, S.T.,M.T<sup>[2]</sup>

Civil Engineering Study Program Faculty of Science and Technology University of Technology Yogyakarta;  
e-mail:[1]ade.maghviroh13@gmail.com, [2]dibyosusilo@gmail.com

## **ABSTRACT**

According to WHO (2010), daily human needs require 30 liters/day, of which 10 liters are for drinking and 20 liters for sanitation. Meanwhile, according to BPS (2014) states that 75.6 billion liters of water are needed for 252 million people in Indonesia. The government has a role in water resource management which includes planning, implementation, and supervision based on applicable regulations. In overcoming this problem, the Jambi provincial government can utilize several water resources consisting of the Trembesi sub-watershed and the Batanghari watershed to determine priority criteria for the Jambi community.

Analytical Hierarchy Process (AHP) Is a method for solving a complex unstructured situation into several components in a hierarchical arrangement, by assigning a subjective value to the relative importance of each variable, and determining which variable has the highest priority in order to influence the outcome of the situation. In determining the criteria in determining the use of water resources in the Trembesi and Batanghari sub-watersheds based on the needs that exist in the community. In the application of AHP in determining the plan for the use of water resources in the Trembesi and Batanghari sub-watersheds, the priority criteria for utilization are for household, city, and industrial (K3) needs. This is evidenced by the vector weight of criterion 3 obtaining a value of 0.62 or 62%. Then the alternative in implementing this criterion is the alternative of building raw water intake (A5). This is indicated by a weight value of 0.50. This means that the value of interest to do is 50%.

Keywords: AHP (Process Hierarchy Analysis), Water Resources, Government Policy

